

# JURNAL KOMUNIKASI

---

---

Volume 4, Nomor 2, April 2010

ISSN 1907-848X

Halaman 103 - 205

---

---

## DAFTAR ISI

### Editorial

#### **Framing Media Merekam Feminisme Indonesia**

*Pratiwi Utami*

( 103 - 118 )

#### **Sinema Independen di Yogyakarta 1999-2008: Idealisme di Tengah Krisis Infrastruktur**

*Masduki*

( 119 - 130 )

#### **Banalitas Informasi Jurnalisme Infotainment dan Dampaknya terhadap Penonton**

*Tri Hastuti Nur R dan Fajar Junaedi*

( 131 - 142 )

#### **Facebook, Silaturahmi, dan Budaya Membaca: Studi Hubungan antara Penggunaan Situs Jejaring Sosial (Facebook) dengan Budaya Silaturahmi dan Membaca di Kalangan Mahasiswa FISHUM UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta**

*Fatma Dian Pratiwi*

( 143 - 154 )

#### **Kontestasi Politik dan Rezim Demokrasi Visual di Indonesia**

*Nyarwi*

( 155 - 166 )

#### **Potret Corporate Social Responsibility (CSR) di Media**

*Abdul Rohman*

( 167 - 182 )

#### **Strategi Komunikasi Pemasaran Terpadu pada Suratkabar Malaysia (Studi Deskriptif Harian Sinar Harian Selangor)**

*Razie Bin Nasarruddin dan Anang Hermawan*

( 183 - 196 )

### RESENSI BUKU:

#### **Studi Manajemen Media: Dari Mana Berangkat?**

*Puji Rianto*

( 197 - 205 )

## **Framing Media Merekam Feminisme Indonesia**

*Pratiwi Utami*<sup>1</sup>

### **Abstract**

*This article explains the framing of feminism in Indonesian newspaper. As an example, a research on how Indonesian feminism was framed in KOMPAS Daily from year 1997-1999 will be included. KOMPAS had been chosen as the research object because this newspaper publishes news about gender and women movement periodically. The discussion in this research will range from textual analysis to the production of news about feminism in media newsroom. Through this article, we also could observe how media ethically should respond the sensitive issues. Because in any situation, media ought to always tell the truth, in order to protect the fundamental rights of the society.*

### **Keywords:**

*Women issues, feminism, gender equality, news frame, media agenda, public agenda, policy agenda.*

### **Pendahuluan**

Media massa telah lama menjalin interaksi dengan perempuan. Isu kesetaraan gender, gerakan feminisme, dan dinamikanya masih hangat untuk dibahas hingga detik ini. Hubungannya seperti “benci tapi rindu”. Para aktivis gender seringkali merasa tersakiti oleh citra perempuan yang dicetak di media massa. Meski demikian, bagaimanapun mereka membutuhkan media massa untuk menyebarkan ideologinya. Begitu juga dengan media massa. Tanpa perempuan dan feminis, mereka akan kehilangan bahan berita.

Hubungan seperti ini bisa terbentuk tak lain karena feminisme sendiri merupakan topik sensitif dan kontroversial di Indonesia. Isu feminisme muncul di tengah-tengah masyarakat penganut hukum patriarki yang melenggangkan dominasi laki-laki atas perempuan. Tingkat kontroversialnya isu ini akan kian meningkat ketika feminisme dibenturkan dengan segala asas kepatutan, nilai susila, dan norma agama yang dipegang oleh masyarakat kita.

Hal menarik seputar feminisme terjadi kala Indonesia masih dipimpin oleh pemerintahan Orde Baru. Pemerintahan di bawah kepemimpinan Soeharto ditandai dengan iklim politik yang represif dan budaya patriarki yang mengakar kuat. Perkawinan antara represivitas dan norma patriarki itu membawa dampak yang mutlak. Negara bisa dengan leluasa ikut campur dalam menentukan kriteria “perempuan yang ideal”, yaitu sebagai istri, ibu, dan perempuan rumah tangga yang baik.

Kuatnya doktrin dari pemerintah Orde Baru memengaruhi cara wartawan memaknai masalah perempuan dan berita tentang masalah perempuan. Banyak

---

<sup>1</sup> Alumnus Ilmu Komunikasi Universitas Gadjah Mada, Editor Penerbit Galangpress Yogyakarta

wartawan yang melihat berita tentang perempuan adalah kisah-kisah perempuan sukses, berita tentang kegiatan-kegiatan sosial kaum wanita terutama dalam kaitannya dengan birokrasi alias ibu-ibu Dharma Wanita dan PKK, masalah peranan wanita dalam pembangunan, dan persoalan ibu-ibu rumah tangga. Ada pula yang menganggap masalah perempuan sebagai isu tahunan yang muncul ketika ada peringatan Hari Kartini setiap tanggal 21 April atau Hari Ibu yang jatuh pada tanggal 22 Desember (Siregar, Pasaribu, dan Prihastuti (ed.), 1999: 106-107). Akibatnya, dalam praktik pemberitaan surat kabar sehari-hari, berita-berita yang bermuatan misi pemberdayaan perempuan, apalagi tentang gerakan perempuan, boleh dibilang sukar ditemukan.

Hingga kini, misi feminisme sangat jelas: memperjuangkan kesetaraan hak antara laki-laki dan perempuan, serta membawa misi peniadaan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan. Namun, hingga kini pula kehadiran feminisme tak selalu disambut dengan tangan terbuka (Arivia, 2006: 3). Ada yang menganggapnya sebagai sebuah jalan tepat untuk mempromosikan nilai-nilai kesejajaran antara laki-laki dan perempuan (Sushartami, 2003a), ada pula yang menyebutnya sebagai praktik sekularisme, liberalisme, dan pluralisme agama (Shalahuddin, 2007). Pada tataran budaya, segala efek negatif kemajuan budaya kontemporer hampir selalu dianggap bersumber pada feminisme. Contoh, adanya kebebasan berhubungan seksual, perceraian, pakaian minim atau seksi, dan lain-lain.

Sikap skeptis dan apatis masyarakat terhadap keberadaan feminisme ini sedikit banyak merupakan imbas dari “tradisi” pemberitaan media mengenai feminisme itu sendiri. Media massa dalam hal ini surat kabar ternyata tak banyak berubah sejak zaman Orde Baru sampai sekarang. Memang, media terkadang mempromosikan nilai-nilai “kesejajaran” antara laki-laki dan perempuan. Namun di sisi lain media masih kerap menuntut perempuan – sebagai “lawan jenisnya” – untuk tetap tinggal terdomestikasi dengan meragukan kemampuan perempuan untuk berkarya bagi publik. Seperti yang ditulis P. Bonnie Kertaredja di harian Kedaulatan Rakyat edisi 23 Desember 1997 bahwa kesempatan buat wanita untuk berperan di luar rumah memang ada, namun tetap saja peran rumah tangga ditekankan kembali (Sushartami, 2003a).

Cara media memperlakukan feminisme juga dilakukan lewat porsi pemberitaan. Ruang dan informasi kelas dua dianggap sudah cukup untuk perempuan. Kalau sudah sampai ke arus utama media khusus perempuan, situasinya jelas “terpisah tapi tak setara” (Wolf, 1997: 138). Penyingkapan kisah tentang berkembangnya “perang politis” perempuan hanya terjadi bila kisah itu sendiri berperang demi sejengkal kolom di sela-sela rahasia-rahasia pribadi para selebriti serta iklan-iklan gel penata rambut. Pada akhirnya, kampanye media massa yang menghilangkan ruang debat dan mengisi ruang yang tersisa dengan penandaan negatif tentang feminisme, hanya akan memperdalam jurang pemisah antara gerakan feminisme dengan perempuan pada umumnya.

Maka, memahami bagaimana media memotret feminisme dirasa penting. Sebab penelitian menunjukkan bahwa penilaian khlayak terhadap feminisme sangat dipengaruhi oleh cara media membingkai isu feminisme tersebut, lebih-lebih jika khlayak tak memiliki pengetahuan dan pengalaman yang cukup tentang feminisme. Sebagai entitas yang menjadi reflektor atas realitas yang melintas di tengah kehidupan masyarakat, media massa tentu punya pandangan tersendiri mengenai gerakan

feminisme. Pun, peristiwa tidak dipandang sebagai sesuatu yang *taken for granted*, akan tetapi ada sebuah negosiasi yang berlangsung saat wartawan dan media akan menyajikan produk berita (Eriyanto, 2005: 7)

### **Karakteristik Berita tentang Feminisme**

Dalam masyarakat patriarkal, peristiwa tentang feminisme sangat menarik untuk diliput dalam berbagai wajah. Selain karena saat ini kita berada di era mediasi, di mana media massa bisa memberitakan apa saja, juga karena realitas tentang adanya gugatan terhadap norma *status quo* mendorong orang untuk mendiskusikannya dengan hangat.

Sejauh ini, topik-topik yang berada di sekitar feminisme tak jauh-jauh dari pelbagai isu yang diadvokasikan oleh para feminis ([www.rockridgenation.org/blog/archive/2007/06/06/askrockridge-framing-feminism](http://www.rockridgenation.org/blog/archive/2007/06/06/askrockridge-framing-feminism)), antara lain:

1. Hak reproduksi (*reproductive rights*). Isu ini tak hanya soal aborsi, tapi juga *sex education*, akses terhadap alat kontrasepsi, perlindungan serta perawatan sebelum dan sesudah melahirkan (*pre and post-natal care*), dan lain-lain.
2. Perdagangan perempuan (*sex trafficking*). Isu ini mencuat karena tingginya angka perdagangan perempuan (wanita dewasa maupun remaja putri) setiap tahunnya.
3. Perempuan di dunia kerja (*women in the workplace*). Berkaitan dengan kiprah perempuan di kancah profesi. Advokasi juga berkenaan dengan masih rendahnya gaji perempuan dibanding laki-laki rekan sekerjanya, serta pelecehan seksual di tempat kerja.
4. Pengentasan kemiskinan (*poverty reduction*). Pada kasus tingginya angka kemiskinan, pihak yang paling tersiksa adalah perempuan, yang harus memutar otak untuk menghidupi keluarga meski dengan gaji yang tak seberapa. Isu ini kemudian mensyaratkan adanya pemberdayaan perempuan (*women empowerment*)

Sementara itu, Mansour Fakih (2003) menyatakan bahwa topik-topik utama perjuangan feminisme adalah ketidakadilan gender. Ketidakadilan gender termanifestasikan dalam pelbagai bentuk ketidakadilan, yakni: marginalisasi perempuan, subordinasi, stereotip, kekerasan, dan beban kerja. Proses marginalisasi perempuan tak saja terjadi di tempat kerja, tapi juga dalam rumah tangga, masyarakat atau kultur dan bahkan negara. Marginalisasi terhadap perempuan sudah terjadi sejak di rumah tangga dalam bentuk diskriminasi atas anggota keluarga yang laki-laki dan perempuan. Marginalisasi juga diperkuat oleh adat istiadat maupun tafsir keagamaan.

Selanjutnya, subordinasi terhadap perempuan. Anggapan bahwa perempuan itu irrasional atau emosional sehingga perempuan tidak bisa tampil memimpin, berakibat munculnya sikap menempatkan perempuan pada posisi tak penting. Stereotip adalah pelabelan atau penandaan terhadap suatu kelompok tertentu. Stereotip selalu merugikan dan menimbulkan ketidakadilan. Banyak sekali ketidakadilan terhadap perempuan bersumber dari penandaan (stereotip) yang dilekatkan pada mereka. Misalnya, anggapan bahwa tugas utama kaum perempuan adalah melayani suami.

*Kekerasan (violence)* adalah serangan atau invasi (*assault*) terhadap fisik maupun integritas mental psikologi seseorang. Kekerasan terhadap sesama manusia salah satunya bersumber dari perbedaan jenis kelamin. Banyak macam dan bentuk kejahatan yang bisa dikategorikan sebagai kekerasan gender, di antaranya: pemerkosaan; pemukulan atau serangan fisik dalam rumah tangga (*domestic violence*) – termasuk kekerasan terhadap anak (*child abuse*); penyiksaan yang mengarah pada organ alat kelamin (*penyunatan/genital mutilation*); pelacuran (*prostitution*); pornografi; pemaksaan sterilisasi dalam Keluarga Berencana atau KB (*enforced sterilication*); memegang atau menyentuh bagian tubuh perempuan tanpa kerelaan si pemilik tubuh; dan pelecehan seksual.

Yang terakhir adalah masalah *beban kerja*. Adanya anggapan bahwa kaum perempuan memiliki sifat memelihara dan rajin serta tidak cocok untuk menjadi kepala rumah tangga, mengakibatkan semua pekerjaan domestik rumah tangga menjadi tanggung jawab kaum perempuan. Konsekuensinya, kaum perempuan harus bekerja keras dan lama untuk menjaga kebersihan dan kerapian rumahnya. Di kalangan keluarga miskin, beban yang sangat berat ini harus ditanggung sendirian oleh perempuan (Fakih, 2003: 13-22).

### **Framing: Strategi Media Mengonstruksi Realitas**

Tindakan yang biasa dilakukan pekerja media tatkala melakukan konstruksi realitas termasuk realitas feminisme dapat dijelaskan melalui analisis framing dan *agenda setting*. Secara garis besar, teori framing mengkaji pola-pola yang muncul ketika media memilih, mengorganisasi, menekankan, menyajikan, atau mengabaikan beberapa aspek dalam fakta untuk kemudian disampaikan pada khalayaknya (Schwalbe, 2006: 267). Dengan teori framing, dapat diketahui bagaimana pandangan media atau wartawan terhadap realitas yang ada.

Robert N. Entman (dalam Eriyanto, 2005) mendefinisikan framing sebagai berikut:

*“...to frame is to select some aspects of a perceived reality and make them more salient in a communicating text, in such way as to promote a particular problem definition, causal interpretation, moral evaluation and/or treatment recommendation...”*

Menurut Entman, membuat kerangka adalah menyeleksi dan memberi perlakuan tertentu terhadap beberapa aspek dari sebuah peristiwa dan membuatnya tampil lebih mencolok dalam teks berita. Hal ini bisa dianggap sebagai cara mempromosikan masalah tertentu, interpretasi kausal, evaluasi moral, dan/atau memberi rekomendasi atas hal-hal yang dijelaskan dalam berita (Griffin, 2003: 397). Dengan mengerangka sebuah peristiwa, cara berpikir khalayak bisa terpengaruh, untuk kemudian mengingat informasi yang didapatkannya (Schwalbe, 2006: 269).

Sementara dari sudut pandang sosiologi, Erving Goffman berasumsi bahwa seseorang tidak bisa memahami dunia secara keseluruhan dan konstan untuk

menginterpretasi apa yang dialaminya dalam kehidupan. Untuk memproses informasi baru secara efisien, seseorang akan mengaplikasikan skema interpretif yang disebut dengan "*primary frameworks*" atau kerangka utama (Goffman: 1974: 24). Kerangka itulah yang kemudian membantu seseorang untuk meletakkan, mempersepsikan, mengidentifikasi, dan melabeli berbagai informasi yang datang pada mereka setiap hari. Framing memang menentukan bagaimana realitas itu hadir di hadapan pembaca.

Ada dua aspek dalam framing (Eriyanto, 2005: 69-70). *Pertama*, memilih fakta/realitas. Proses memilih fakta ini didasarkan pada asumsi, wartawan tidak mungkin melihat peristiwa tanpa perspektif. Dalam memilih fakta ini selalu terkandung dua kemungkinan: apa yang dipilih (*included*) dan apa yang dibuang (*excluded*). Penekanan aspek tertentu itu dilakukan dengan memilih aspek tertentu, memilih fakta tertentu, melupakan fakta yang lain, memberitakan aspek tertentu dan melupakan aspek lainnya. Intinya, peristiwa dilihat dari sisi tertentu. Akibatnya, pemahaman dan konstruksi atas suatu peristiwa bisa jadi berbeda antara satu media dengan media lain.

*Kedua, menuliskan fakta. Proses ini berhubungan dengan bagaimana fakta yang dipilih itu disajikan kepada khalayak. Gagasan itu diungkapkan dengan kata, kalimat, dan proposisi apa, dengan bantuan aksentuasi foto dan gambar apa, metafora apa yang digunakan untuk mendeskripsikan, dan sebagainya.*

Framing adalah perpanjangan teori *agenda setting*. Framing menjadi alat untuk menyusun agenda. *Agenda setting* menunjuk makna bahwa media memiliki kekuatan untuk menggerakkan perhatian khalayak terhadap isu tertentu (Yusuf, 2004: 353). *Agenda setting* adalah pemahaman bahwa berita memengaruhi agenda publik yang secara rutin diberitakan oleh media massa. Sebab, menurut McComb and Shaw, *mass media have the ability to transfer the salience of items on their new agendas to public agendas* (Griffin, 2003: 396). Media massa dipandang memiliki kemampuan untuk memindahkan unsur-unsur yang menonjol dalam agenda beritanya kepada agenda publik.

Teori fungsi *agenda setting* ini menggambarkan media berperan sebagai *gatekeeper* (penjaga pintu) informasi. Dalam ruang redaksi, media melakukan seleksi berita, membuat pilihan-pilihan mengenai apa yang dilaporkan, serta bagaimana melaporkannya. Dari hasil seleksi berita itu terkumpul sejumlah berita yang kelak akan memenuhi kolom tertentu dalam surat kabar (McQuail, 1994: 162-163).

Dengan seleksi yang ada, media kerap membuat beberapa isu menjadi lebih menonjol dibanding berita lain. Sehingga, pembaca kemudian menganggap berita yang disajikan media adalah lebih penting. Maka, apa yang dianggap penting oleh media atau apa yang diagendakan oleh media kemudian dapat dianggap penting oleh publik atau dapat menjadi agenda publik juga. Hal inilah yang dimaksud McCombs ketika ia mengatakan, "*media do influence the way we think*" (dalam Griffin, 2003: 396). Media memiliki kekuatan untuk membentuk agenda khalayaknya, menjadikan sesuatu hal yang penting untuk dilakukan oleh khalayak. Apa yang dikemukakan oleh media dianggap membantu mendefinisikan apa yang dipikirkan oleh khalayak.

Pamela J. Shoemaker dan Stephen D. Reese meringkas beberapa faktor yang memengaruhi kebijakan redaksi dalam memproduksi berita (Sudibyo, 2001: 7-12):

1. Faktor individual, berhubungan dengan latar belakang profesional pengelola media.
2. Rutinitas media, berhubungan dengan mekanisme dan proses penentuan berita.
3. Level organisasi, berhubungan dengan struktur organisasi yang secara hipotetik memengaruhi pemberitaan.
4. Level ekstramedia, berhubungan dengan lingkungan di luar media, antara lain:
  - Sumber berita, yang di sini dipandang bukan sebagai pihak yang netral tapi juga memiliki kepentingan untuk memengaruhi media dengan berbagai alasan, misalnya memenangkan opini publik, memberi citra tertentu kepada khalayak, dan sebagainya.
  - Sumber penghasilan media, berupa pemasang iklan, penanam modal, dan lain-lain. Media harus *survive*, untuk itu kadangkala media harus berkompromi dengan pihak-pihak dan pelbagai sumber daya yang menghidupi mereka.
  - Pihak eksternal, seperti pemerintah dan lingkungan bisnis.
5. Level ideologi, yang diartikan sebagai kerangka berpikir atau kerangka referensi individu dalam menafsirkan realitas dan bagaimana mereka menghadapinya.

Jadi, jika kita lihat lagi, proses framing atas sebuah peristiwa sebenarnya tergantung pada kinerja wartawan dan kebijakan redaksional media yang bersangkutan. Perbedaan karakteristik maupun kepemilikan referensi seorang wartawan bisa memengaruhi sikapnya dalam menyusun berita. Pun, ada kriteria-kriteria atau standar tertentu dalam ruang redaksi yang bisa menentukan realitas apa yang bisa diangkat jadi berita. Hal ini disebut dengan nilai kelaikan berita (*news values/news worthy*).

Jadi, jika kita lihat lagi, proses framing atas sebuah peristiwa sebenarnya tergantung pada kinerja wartawan dan kebijakan redaksional media yang bersangkutan. Perbedaan karakteristik maupun kepemilikan referensi seorang wartawan bisa memengaruhi sikapnya dalam menyusun berita. Pun, ada kriteria-kriteria atau standar tertentu dalam ruang redaksi yang bisa menentukan realitas apa yang bisa diangkat jadi berita. Hal ini disebut dengan nilai kelaikan berita (*news values/news worthy*).

### **Interaksi Media Massa Indonesia dengan Isu Feminisme**

Dalam beberapa kasus, pemberitaan media di Indonesia—terutama yang berhubungan dengan peristiwa yang melibatkan pihak dominan—selalu disertai dengan representasi buruk pihak yang kurang dominan (Sobur, 2002: 36). Ini terjadi pula pada pemberitaan soal perempuan. Gambaran tentang perempuan yang menjadi korban justru digambarkan serba buruk. Perempuan adalah sosok yang mewakili simbol kehalusan, sesuatu yang bergerak lamban dan lemah. Perempuan begitu dekat dengan ketertindasan, ketidakberdayaan, dan sebagainya. Belum lagi iklan yang menggunakan bentuk fisik perempuan untuk menarik perhatian.

Pada akhirnya, disadari atau tidak, langsung atau tidak langsung, yang turut tersebar dan terlestarikan melalui media massa adalah “ideologi gender”. Melalui media massa kita belajar menyesuaikan diri dengan harapan-harapan masyarakat agar

berperilaku seturut perbedaan dan stereotip gender. Melihat kuatnya fungsi kultural media massa tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa media juga bisa sangat berpengaruh bagi perkembangan feminisme di seluruh dunia. Bagaimana ide dan konsep feminisme diterima warga dunia akan sangat dipengaruhi sikap media massa terhadap realitas mengenai feminisme itu sendiri.

Awal era 1960-an, ketika gerakan perempuan baru hangat, media massa di negara-negara Barat belum memberikan perhatian yang cukup. Bisa dibayangkan, meski pemberitaan media cetak maupun televisi tentang perempuan mulai meningkat, porsi kolom berita untuk isu feminisme relatif jarang (Lind dan Salo, 2002: 214). Ketika sosok feminisme mulai dilirik oleh media massa sebagai bahan berita, penggambaran mengenai feminisme ternyata banyak berkonotasi negatif, dan seringkali mencapai titik-titik ekstrim.

Beberapa penelitian menunjukkan bahwa para media memotret kaum feminis sebagai orang gila, pembenci lelaki, anti-keluarga, anti-bra, hingga lesbian radikal. Penelitian Rebecca Ann Lind dan Colleen Salo tahun 1993-1996 mengenai framing tentang feminis dan feminisme di empat media elektronik terkemuka di AS menemukan fakta bahwa feminis digambarkan sebagai sesuatu yang buruk (*demonized*) lebih banyak ketimbang perempuan biasa (Lind dan Salo, 2002: 219).

Di Indonesia, interaksi antara feminisme dan media massa sudah terjadi kala Soeharto masih bertahta. Pemerintahan Orde Baru yang bertahta selama 32 tahun di Indonesia, ditandai dengan iklim politik yang represif serta budaya patriarki yang mengakar kuat. Pengaruh dua elemen ini menjalar ke semua sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. “Perkawinan” antara represivitas dengan sistem patriarki ini membuahkan sebuah penderitaan berkepanjangan bagi perempuan Indonesia, baik secara kultural maupun struktural. Negara dengan leluasa ikut campur dalam penentuan kriteria “perempuan yang baik”.

Dengan konsep Dharma Wanita yang dibangun pemerintah, perempuan Indonesia harus setuju untuk menjadi istri, ibu, dan ibu rumah tangga yang baik. Dharma Wanita dianggap bisa mengembalikan perempuan Indonesia “ke jalan yang benar”, setelah Gerwani dituding turut andil dalam peristiwa G30S-PKI. Jika tak mengikuti amanat Dharma Wanita, maka perempuan akan dianggap berhaluan kiri, dan bisa dipastikan pemerintah langsung menindaknya dengan tegas.

Selama era Orde Baru, sosok kaum perempuan “diadili” secara sepihak di media massa. Perempuan diidentikkan dengan peran-peran domestik. Antara lain penjaga nilai-nilai dalam rumah tangga, pelayan laki-laki, dan penyambung keturunan. Peran-peran perempuan selalu terbatas pada kotak “reproduksi dan domestikasi”. Bahkan dalam budaya Jawa, perempuan dikenal sebagai *kanca wingking*, yang lagi-lagi maknanya tak jauh dengan aktivitas-aktivitas domestik di dapur, kasur, dan sumur.

Ini terjadi sebagai dampak dari kuatnya akar kultur patriarki di Indonesia. Menurut Sylvia Walby, patriarki adalah sistem struktur dan praktik sosial yang menempatkan kaum laki-laki sebagai pihak yang mendominasi, melakukan opresi, dan mengeksploitasi kaum perempuan (May Lan, 2002: 14). Kenyataan ini juga memengaruhi penentuan *news value* dan sifat fakta sosial tentang perempuan.

Suatu peristiwa yang menyangkut perempuan akan segera bernilai berita jika di sana terlihat keterlibatan perempuan dalam pembangunan. A, sifat fakta sosial tentang perempuan harus selalu berkaitan dengan peran perempuan dalam pembangunan apabila ia hendak diangkat menjadi bahan berita. Akibatnya, dalam praktik pemberitaan surat kabar sehari-hari, berita-berita yang bermuatan misi pemberdayaan atau gerakan perempuan, boleh dibilang sukar ditemukan. Upaya pemberdayaan perempuan melalui media dianggap terlalu idealis.

Perempuan di Indonesia ditindas oleh bentuk-bentuk patriarki ini secara beruntun selama Orde Baru berlangsung. Perempuan, memang diagung-agungkan oleh pemerintahan Orde Baru. Namun, pengagungan itu selalu bermuara pada paham "ibuisme", yang lagi-lagi meletakkan perempuan hanya pada ruang-ruang pribadi. Konsep "mitra seajar" dan "peran ganda" yang dikukuhkan organisasi yang dibentuk negara seperti Dharma Wanita dan PKK, serta ungkapan pemuliaan seperti "Ratu Rumah Tangga" sebenarnya merupakan proses penundukan perempuan secara sistematis lewat gerakan institusional oleh negara.

Pada kasus ini, perempuan bukannya tak bisa melawan. Hanya saja, mereka tak diberi kesempatan berpikir untuk melawan, jika pun sudah memiliki kesadaran, aspirasi perempuan tak punya wadah untuk disuarakan. Meski kita menyaksikan sejumlah tokoh perempuan mulai bermunculan di berbagai bidang kehidupan, namun kepentingan, aspirasi, pengalaman – dan karenanya – keberadaan perempuan-perempuan Indonesia tidak begitu saja terwakili oleh tokoh-tokoh tersebut (Hartiningih, 1999). Suara perempuan, adalah suara yang terbisukan.

Wartawan pada masa Orde Baru memang masih terlalu takut untuk memberikan interpretasinya sendiri terhadap realitas tentang perempuan selain ibu-ibu Dharma Wanita dan penggerak PKK. Mereka harus berpikir berkali-kali untuk mengeluarkan pemberitaan yang tak sesuai dengan "petunjuk" pemerintah. Sebab, budaya politik Orde Baru memiliki kemampuan kontrol yang kuat atas media melalui kepemilikan, pembredelan, dan kebijakan sensor yang diterapkannya. Pers, pada akhirnya, tak mampu berhadapan dengan kekuasaan yang masih berakar pada sistem patriarki. Institusi ini hanyalah salah satu lembaga yang justru menopang struktur relasi patriarkis.

Ketika rezim Orde Baru runtuh, era pers terbuka di zaman reformasi membawa media mencapai temperatur kebebasan. Dicaputnya SIUPP membuat media bebas memberitakan apa saja, siapa saja, dan bagaimanapun caranya. Termasuk, media juga bebas mengkristalkan orientasi medianya untuk memenuhi segmen dan karakter khalayak. Media-media baru ramai bermunculan laiknya cendawan di musim hujan. Tak ada lagi kekuasaan super yang mampu menghentikan langkah mereka dalam segala aktivitas jurnalistik.

Menurut Wiwik Sushartami, selain ditandai dengan bermunculannya berbagai macam media dan tuntutan akan pers yang lebih bebas, jatuhnya pemerintahan Orde Baru pada tahun 1998 juga telah menimbulkan ambivalensi mengenai identitas gender di Indonesia. Jika pada masa kekuasaannya rezim ini telah mengkonstruksi sistem yang dominan mengenai identitas dan perilaku gender, kejatuhannya membuka jalan pada

proses yang dinamis untuk membuat pemaknaan dan negosiasi ulang mengenai identitas gender (Sushartami, 2003b).

Tanpa pembatasan maupun perpanjangan tangan pemerintah dalam diskursus-diskursus publik, berbagai pemikiran baru tentang gender mulai berani unjuk gigi melalui berbagai wadah organisasi maupun individu. Celah bagi perempuan untuk berkiprah di ruang publik menjadi lebih luas. Aktivitas media juga menjadi lebih dinamis. Para pekerja jurnalistik relatif lebih leluasa memperlebar ruang pandangnya terhadap isu-isu tentang perempuan dan gender. Wajah perempuan Indonesia di mata wartawan – baik sebagai individu maupun sebagai bagian dari institusi media – menjadi lebih bervariasi dan lebih terbuka akan interpretasi.

Pada titik ini, media tidak lagi hanya dilihat sebagai alat untuk menyebarkan informasi, tetapi juga sebagai satu situs di mana imajinasi sosial dikonstruksi dan direkonstruksi, diproduksi, dan direproduksi. Lebih lagi, dengan memahami representasi dan penggunaan media, kita juga bisa mengemukakan partisipasi perempuan yang aktif dalam kehidupan kultural dan politik di Indonesia (Sushartami, 2003b).

Kini, beberapa surat kabar cenderung menempatkan isu-isu keperempuanan dalam halaman-halaman khusus, suplemen khusus, bahkan ada juga yang telah memiliki rubrik yang khusus membahas masalah-masalah perempuan. Dari fakta ini, muncul sebuah pertanyaan: apakah dengan keberadaan rubrik-rubrik khusus di halaman-halaman khusus itu menunjukkan bahwa surat kabar-surat kabar tersebut sudah sensitif gender, dan menaruh kepedulian pada kemajuan gerakan perempuan?

Dari perspektif gender, halaman-halaman khusus, rubrik-rubrik khusus atau suplemen khusus perempuan itu justru dilihat sebagai penciptaan kantong-kantong eksklusif bagi masalah-masalah perempuan. Isu-isu perempuan dikarantinakan sebagai isu yang spesifik dan cenderung dilepaskan dari isu-isu politik penting lainnya, seperti politik, ekonomi, hukum, dan kebudayaan. Dalam konteks ini, isu perempuan direduksi sedemikian rupa sehingga tak punya kaitan integral dengan masalah kemasyarakatan penting lain, terutama masalah kekuasaan dan kekayaan (Siregar, Pasaribu, dan Prihastuti (ed.), 1999: 113-114).

Dari segi pengemasan, kebanyakan surat kabar menempatkan isu perempuan sebagai bacaan ringan yang lebih pas dibaca di waktu senggang dan santai. Itulah sebabnya rubrik perempuan kebanyakan diturunkan di hari Minggu, dan ditulis dalam bentuk *feature* agar enak dibaca (Siregar, Pasaribu, dan Prihastuti (ed.), 1999: 114). Isi *woman space* ini pun seringkali berisi hal-hal domestik, seperti resep masakan, tips memasak, atau mode. Isu-isu perempuan kelas bawah seperti buruh dan kaum marjinal, jarang sekali bisa ditemukan di edisi hari Minggu.

Hal yang sama juga terjadi pada beberapa media atau majalah perempuan di Indonesia. Majalah-majalah khusus untuk perempuan saat ini, memang sering menyodorkan sosok baru perempuan modern dan mandiri. Namun majalah perempuan juga masih menyisakan halaman untuk diisi dengan resep masakan, tips merias diri, cara memanjakan dan melayani pasangan, dan sebagainya.

Media semacam ini belum bisa menghadirkan ruang perdebatan mengenai feminisme dan pemberdayaan perempuan itu sendiri, dan malah kadang terpeleset

terlalu jauh pada liputan gaya hidup metropolit. Padahal, menurut Naomi Wolf, media-media itu sangat mampu untuk menjadi jantung feminisme. Mereka merupakan alat yang potensial untuk menyalurkan debat mendasar mengenai isu-isu keperempuanan secara berkala (Wolf, 1997: 135).

### **Framing dan Produksi Berita Feminisme di Harian KOMPAS**

Selama memasuki masa transisi dari iklim represif ke iklim reformasi (1997-1999), fenomena menarik terlihat dalam pemberitaan harian KOMPAS. Harian yang secara periodik mengeluarkan berita tentang perempuan dalam rubrik khusus ini menunjukkan perubahan dalam mem-framing isu-isu feminisme. Di tahun 1997, KOMPAS banyak mengangkat isu bertema feminisme dalam hal peran publik perempuan dalam pembangunan. Karena itu, framing yang terbentuk adalah jika peran publik perempuan ditambah, maka lajunya pembangunan dan pertumbuhan ekonomi juga bisa ditingkatkan.

Sementara, di tahun 1998, berita-berita yang muncul adalah soal isu kekerasan dan hak-hak politik perempuan. Saat perpindahan rezim ini, framing KOMPAS adalah dekonstruksi terhadap sosok perempuan yang selama masa Orde Baru telah disetir melalui kriteria “ibu yang baik” dan konsep peran ganda. Berbeda dengan doktrin Orde Baru yang melekatkan perempuan dengan sifat-sifat lemah, tergantung pada suami, tidak terampil, tidak perlu ikut campur dalam hal-hal publik, dan berkutat di kotak domestikasi, KOMPAS mengajukan sosok perempuan yang berbeda dengan kriteria perempuan di zaman Orde Baru. Citra baru yang dibangun KOMPAS mengenai identitas perempuan Indonesia adalah mampu menjadi pemimpin, pandai berpolitik, dan berhasil berprestasi di bidang pekerjaan yang selama ini identik dengan laki-laki. Dekonstruksi itu dilakukan dengan isi berita yang kebanyakan bernada gugatan.

Tahun 1999 adalah tahun pertama reformasi berjalan, dan rubrik Swara (rubrik khusus perempuan) di harian KOMPAS telah lahir. Kajian mendalam mengenai permasalahan perempuan dibahas di rubrik ini. Pada tahun ini, berkaitan dengan momen Pemilu 1999, isu yang paling banyak muncul adalah mengenai kesadaran dan pembelaan hak perempuan di bidang politik. Yang menjadi sasaran utama pada frame ini adalah pemerintah melalui kebijakan-kebijakannya, dan kaum perempuan sendiri yang dipandang masih belum memiliki kesadaran untuk berpolitik – minimal menggunakan hak pilihnya secara bebas. Isu politik menjadi isu sentral yang diangkat dalam pemberitaan di tahun ini (Utami, 2007: 79-123).

Kerangka yang terbentuk ini tidak bisa dilepaskan dari berbagai faktor dan aktor yang terlibat dalam pembuatan berita di harian KOMPAS. Faktor dan aktor ini masing-masing akan saling terlihat pengaruhnya dalam proses pembentukan berita (*newsroom*). *Newsroom* di sini dipandang bukan sebagai ruang hampa, netral, dan seakan-akan hanya menyalurkan informasi yang didapat, tak lebih dan tak kurang (Sudibyo, 2001: 7). Dalam *newsroom*, banyak kepentingan dan pengaruh bertemu, dan akhirnya bisa mengintervensi KOMPAS dalam memproduksi berita tentang feminisme.

Proses pengambilan keputusan di *newsroom* harian KOMPAS dapat dianalisis berdasarkan formula Shoemaker dan Reese. *Pertama*, pada level individual, berita-

berita bertema perempuan secara umum dipegang oleh dua wartawan utama yaitu Ninuk Mardiana Pambudy dan Maria Hartiningsih. Keduanya berlatar belakang pendidikan S-2 bidang kajian Studi Perempuan dari Fakultas Pascasarjana Universitas Indonesia. Maria Hartiningsih bahkan pernah ke AS untuk belajar di bidang studi wanita. Tengah tahun 1998, Maria kembali ke Indonesia dengan membawa “pencerahan”. Secara pribadi, ia mengaku bahwa saat itu ia tengah “panas-panasnya” bicara kesetaraan gender. Karena itu ketika kembali ke Indonesia, Maria langsung membagi semangatnya melalui tulisan-tulisannya (berdasarkan wawancara dengan Maria Hartiningsih, 4 Juli 2007). Sejak itu, tulisan-tulisan bernada advokatif bahkan provokatif mengenai isu feminisme jadi semakin sering mengisi lembar-lembar harian KOMPAS.

Semangat yang masih segar itu kemudian disambung dalam sebuah diskusi di ruang redaksi KOMPAS. Mantan Pemimpin Perusahaan KOMPAS Roesilah Kasijanto menginginkan adanya lembar khusus untuk perempuan. Wakil Pemimpin Redaksi KOMPAS August Parengkuan kemudian meminta Ninuk Mardiana Pambudy untuk membuat rancangan terbitan khusus perempuan. Pemimpin Redaksi Jakob Oetama menyetujui konsep yang diajukan Ninuk bersama teman-teman, yaitu terbitan yang menyajikan kebutuhan strategis dan praktis perempuan. Wartawan lain yang juga membidani terbentuknya konsep Swara adalah JB Kristanto, Bre Redana, Maria Hartiningsih, dan Chris Pudjiastuti. Maka lahirlah rubrik Swara pertama kali di bulan Mei 1999 (hasil wawancara dengan Ninuk M Pambudy, 30 Juli 2007). Dari sini bisa dilihat bahwa kondisi individual wartawan media bisa memberi pengaruh yang besar dalam menggeser atau mengubah pandangan media terhadap sebuah isu.

*Kedua*, pada level rutinitas media, terutama ketika Swara telah lahir, rapat penentuan tema tidak dilakukan dalam sebuah rapat khusus, melainkan hanya pembicaraan informal, biasanya dibicarakan awal minggu mengingat Swara terbit Senin dan deadline-nya adalah Sabtu malam. Selain pada rapat tema, melalui rapat atau diskusi antarteman pun tema bisa ditentukan. Sementara untuk porsi/presentasi pemberitaan tentang perempuan di KOMPAS secara umum tidak ditentukan secara kaku, tergantung dari peristiwa yang terjadi atau apa yang direncanakan oleh Redaksi.

Sistematika penulisan dalam rubrik ini bersifat fleksibel. Dalam setiap penerbitannya Swara berisi tiga sampai tujuh artikel, tergantung dari kebijakan editor. Tema isu perempuan yang diangkat antara lain:

- Perempuan dalam wacana agama
- Perempuan dalam budaya patriarki
- Kesetaraan gender
- Pengarusutamaan gender
- Kuota perempuan dalam parlemen dan parpol
- Kekerasan dalam rumah tangga
- Undang-Undang Perkawinan
- Pemberdayaan ekonomi perempuan
- Perempuan pasca bencana
- Perempuan dalam perspektif media

Kecenderungan aktivitas yang berkaitan dengan rutinitas KOMPAS di sini adalah, bahwa secara umum penentuan tema yang akan diangkat KOMPAS khususnya Swara dalam memberitakan perempuan berada di tangan dua aktor utama, yaitu Ninuk Mardiana Pambudy dan Maria Hartiningsih, yang telah memiliki *frame of reference* spesifik mengenai kehidupan perempuan.

*Ketiga*, di level organisasi, Ninuk menjelaskan bahwa secara umum Swara adalah rubrik yang berdiri sendiri. Swara merupakan bagian dari Desk Non-Berita, sehingga penentuan tema atau proses pengambilan keputusan dalam proses produksi berita bersifat independen dan tak dipengaruhi oleh struktur dalam organisasi KOMPAS. Pihak-pihak yang bisa mempengaruhi proses pengambilan keputusan adalah pihak penanggungjawab rubrik dan para penulis dengan saling bertukar pikiran.

*Keempat*, level ekstramedia. Termasuk pada level ini adalah sumber berita. Berita-berita tentang perempuan di KOMPAS kebanyakan memang ditulis oleh Ninuk Mardiana Pambudy dan Maria Hartiningsih. Meski demikian, tak hanya mereka yang bisa menyumbang tulisan. Siapa saja bisa mengisi rubrik ini sepanjang dia memakai kaca mata kesetaraan dan keadilan gender. Dalam perjalanannya rubrik ini juga diramaikan oleh banyak pihak, dari ibu rumah tangga, akademisi, aktivis perempuan, anggota DPR, DPD, politisi, pejabat pemerintah dsb, sepanjang memenuhi kriteria penulisan yang ditetapkan KOMPAS.

Meskipun berada di tengah iklim politik yang represif, baik Ninuk maupun Maria mengaku tak pernah mendapat tekanan apapun dari pemerintah. Hanya saja, Ninuk, Maria dan rekan-rekan yang kerap menulis berita tentang perempuan tetap harus membaca situasi yang berlangsung di masyarakat. Artinya, tetap ada berbagai penyesuaian dan pemakluman dari tubuh redaksi sendiri, misalnya pada kasus-kasus Gerwani. Meski demikian, ada banyak cara agar KOMPAS tetap bisa memberitakan informasi tentang Gerwani ini. Misalnya meletakkannya di tengah-tengah berita lain sehingga tidak terlihat terlalu mencolok, kemudian di bagian awal berita dimulai dulu dengan sejarah, baru cerita tentang tokoh Gerwani-nya, lalu implikasi dari itu semua. Selain itu, KOMPAS juga jarang menyebut "Gerwani", tapi dengan "organisasi perempuan".

Dinamika yang terjadi di ruang redaksi KOMPAS di atas menunjukkan bahwa sebenarnya ada kontrol-kontrol tertentu yang mampu membatasi kelincahan media memberitakan sebuah isu, apalagi jika isu dirasa sensitif di mata masyarakat.

*Kelima*, di level ideologi, pada dasarnya seluruh berita yang diterbitkan KOMPAS haruslah sejalan dengan visi dan misi harian ini: Amanat Hati Nurani Rakyat, yang diterjemahkan dalam bentuk mengarahkan fokus perhatian pada kepentingan rakyat dan mengatasi kepentingan kelompok. Kristalisasi visi dan misi itu adalah semangat humanisme transendental. Artinya, berita-berita yang disajikan oleh KOMPAS mesti dilihat dari sudut pandang ini. Beritanya haruslah dibubuhi dengan semangat membela sesama manusia, sebab prinsip humanisme transendental mensyaratkan seluruh wartawan KOMPAS untuk meletakkan nilai-nilai kemanusiaan di atas segalanya.

Berkaca pada konsistensi KOMPAS dalam mematuhi koridor visi dan misi itu, bisa dikatakan bahwa pada awalnya KOMPAS sebenarnya belum sadar betul pentingnya

menyebarkan isu kesetaraan gender. Kala itu, terutama ketika masih berada di bawah pemerintahan Orde Baru, fakta-fakta tentang perempuan akan masuk ke halaman KOMPAS jika dan hanya jika realitas tersebut bernilai kemanusiaan. Ini terjadi karena KOMPAS ingin menjadi media massa yang humanis. Maka, bila ada anggota masyarakat yang tertindas, termasuk kaum perempuan, ia laik diberitakan.

Hal tersebut ditegaskan oleh Ninuk Mardiana Pambudy, Redaktur rubrik Swara. Ia mengatakan, untuk berita-berita perempuan, feminisme, dan kesetaraan gender, pihaknya selalu berpijak pada landasan membela yang papa dan mengingatkan yang mapan. Jadi, selama hak-hak asasi perempuan sebagai manusia masih ditindas, maka KOMPAS akan terus memberitakan soal itu. Memang, sejak dulu, secara umum KOMPAS sangat concern terhadap masalah perempuan. Harian KOMPAS sendiri pernah menyelenggarakan seminar tentang gender pada tahun 1987. Seperti dikatakan Budiarto Danudjaja:

“Dalam pemberitaan sangat banyak, khususnya mengenai pekerja perempuan (*women labour*). Bahkan kami pernah melakukan liputan bersambung tentang pekerja perempuan dan dibukukan. [...] Jadi kebijakan KOMPAS sangat mendorong terhadap masalah kesetaraan dan memberikan perlindungan terhadap pekerja wanita.”

Meski demikian, misi KOMPAS baru sampai pada sumbangsih secara umum kepada kemanusiaan melalui pemberitaannya yang membela kaum papa, belum secara spesifik menjadi media yang feminis (Utami, 2007: 160-164).

### **Penutup: Tinjauan Etis atas Framing Media tentang Feminisme**

Secara umum, cara penulisan berita KOMPAS tentang fakta-fakta feminisme dari tahun ke tahun memiliki sebuah persamaan, yaitu selalu berbentuk *one-sided news*. Pendapat-pendapat yang hadir dalam berita hanya datang dari satu pihak, yaitu pihak yang pro terhadap frame KOMPAS dan tidak ada opini tandingan dari mereka yang kontra. Di sini, KOMPAS tak menjadikan medianya sebagai medan perdebatan atau mimbar diskusi bagi opini-opini yang berlawanan. Sebaliknya, KOMPAS menjadikan dirinya sebagai media bagi pihak-pihak yang ingin mengadvokasikan ide-ide kesetaraan gender kepada masyarakat.

Ini pula yang menjadi cara bagi KOMPAS untuk memengaruhi agenda publik dan agenda kebijakan pemerintah. Dengan menjadi media advokasi, KOMPAS telah merangsang berkembangnya LSM-LSM yang aktif di bidang perempuan. Beberapa kali KOMPAS bekerjasama dengan Yayasan Mitra Perempuan dalam mengabarkan kasus kekerasan terhadap perempuan. Dalam berita-berita yang ada, Yayasan Mitra Perempuan mempromosikan diri lewat KOMPAS sebagai lembaga bantuan untuk perempuan yang menjadi korban tindak kekerasan. Namun seharusnya hal ini tidak menutup pintu bagi mereka yang kontra untuk urun bicara (Utami, 2007: 174-177).

Hal ini semestinya berlaku pula bagi media massa pada umumnya. Saat meliput isu sensitif, seharusnya media menjadi mimbar publik. Dengan begitu artinya media

telah menjalankan prinsip-prinsip demokrasi serta memenuhi hak pembaca untuk mengetahui realitas yang sesungguhnya. Dalam kondisi seperti ini, ketika media tengah diliputi semangat untuk memperkenalkan ideologi-ideologi tertentu, konsep “*people's right to know*” (hak masyarakat untuk tahu) memang menjadi isu etis yang mengemuka. Seperti dituliskan Fink, *the people's right to know gives the press duty to print it* (Fink, 1995: 15). Masyarakat tetap punya hak untuk mengetahui adanya pro dan kontra.

Konsep itu kemudian menuntut beberapa syarat dari media, antara lain objektivitas (*objectivity*) dan etika penulisan yang jujur (*the ethics of honest writing*). Objektivitas berkaitan dengan sikap netral media dalam memberitakan suatu isu. Memang mustahil jika media bisa murni objektif dan netral. Meski begitu, seharusnya media bisa berusaha optimal untuk mendekati sikap objektif. Salah satunya – berkaitan dengan isu feminisme di harian KOMPAS, adalah dengan membedakan antara misi advokasi dengan jurnalisme murni.

Fink menyebutkan ada dua faktor yang harus diperhatikan ketika wartawan sebuah media memilih “jalan” advokasi, yaitu:

1. Jurnalisme advokasi sangat berbeda dengan jurnalisme objektif. Maka, media dan wartawan harus bisa memandang perbedaannya. Sebab, menurut Fink, *it is unethical to blur the distinction between journalism and the fair and objective reporting*. Begitu pula, wartawan harus memilih media advokasi sebagai tempatnya bekerja, bukan media umum.
2. Jika sebuah media memilih untuk menjadikan dirinya media advokasi, wartawan harus secara terbuka menunjukkan label advokasi itu kepada semua pihak. Ia tidak bisa berlindung di belakang media umum dan secara tidak etis membawa ideologi-ideologi pribadi yang tidak menjadi misi utama medianya (Fink, 1995: 31-32).

Sementara itu, *the ethics of honest writing* berkaitan dengan pemilihan sumber berita dan cara pemilihan kutipan. Sumber berita sangat berpengaruh pada terbentuknya opini publik. Sedangkan pemilihan kutipan yang dilakukan wartawan bisa menjadi “jebakan” tersendiri dan berpotensi untuk menyembunyikan opini-opini tertentu dari narasumber tertentu pula (*the sin of disguised opinion*) (Fink, 1995: 63-64).

Melihat “bahaya” yang bisa dihasilkan oleh pemilihan kutipan dan narasumber yang dimuati oleh asumsi, seharusnya media bisa menjaga independensinya, bahkan independensi dari prasangka dan asumsi pribadi wartawan. Lebih daripada itu, secara general media tetap harus kembali kepada fungsi-fungsi dasar mereka. Seperti kata Robert F Kennedy, koran sebanding dengan pengadilan – bahkan terkadang lebih – dalam melindungi hak-hak fundamental orang banyak (dalam Rivers, Jensen, dan Peterson, 2004: 99). Pendapat Robert Kennedy ini bersimpul erat dengan tanggung jawab media di tengah masyarakat yang bebas.

*Pertama*, media harus menyajikan “pemberitaan yang benar, komprehensif, dan cerdas”. Media dituntut untuk selalu akurat, dan tidak boleh berbohong. Fakta harus disajikan sebagai fakta, dan pendapat harus dikemukakan murni sebagai opini. *Kedua*, media harus berperan sebagai forum pertukaran pendapat, komentar, dan kritik.

Artinya, apapun isu yang sedang hangat diangkat, media harus berfungsi sebagai penyebar gagasan, yakni menyodorkan suatu masalah kepada khalayak untuk dibahas bersama.

*Ketiga*, media harus memahami kondisi semua kelompok di masyarakat secara akurat tanpa terjebak dalam stereotip. *Keempat*, media harus selalu menyajikan dan menjelaskan tujuan dan nilai-nilai masyarakat. Ini tidak berarti media harus mendramatisir pemberitaannya, melainkan berusaha mengaitkan suatu peristiwa dengan hakikat makna keberadaan masyarakat. Sebab, media adalah instrumen pendidik masyarakat sehingga harus memaparkan sesuatu dengan mengaitkannya ke tujuan dasar masyarakat.

*Kelima*, media harus membuka akses penuh ke berbagai sumber informasi. Walaupun masyarakat tidak membutuhkan semua informasi yang ada, tersebarnya informasi akan memudahkan pemerintah menjalankan tugasnya (Rivers, Jensen, dan Peterson, 2004: 105-109). Berangkat dari hal di atas, patut diperhatikan bahwa meski ingin menyebarkan ideologi kesetaraan gender, KOMPAS tak bisa begitu saja menutup mata akan adanya perbedaan mutlak di masyarakat mengenai isu tersebut.

Prinsip objektivitas dan keinginan luhur untuk memenuhi amanat demokrasi harus tetap dijunjung tinggi. Sebab, pemaksaan atas terbentuknya opini tertentu mengenai feminisme dan kesetaraan gender sama saja dengan pembungkaman atas demokrasi. Karenanya, pemuatan opini harus tetap berimbang, pembuktian asumsi harus dilakukan dengan sehat, serta tetap memperhatikan kebutuhan gender sesungguhnya dari kaum perempuan.

### Daftar Pustaka

- Anonim. "How to Detect Bias in the News", tersip di [www.rockridgenation.org/blog/archive/2007/06/06/askrockridge-framing-feminism](http://www.rockridgenation.org/blog/archive/2007/06/06/askrockridge-framing-feminism), diakses 24 Juli 2007.
- Arivia, Gadis. 2006. *Feminisme: Sebuah Kata Hati*. Jakarta: Penerbit Buku KOMPAS.
- Eriyanto. 2005. *Analisis Framing: Konstruksi, Ideologi, dan Politik Media*. Yogyakarta: LKiS.
- Fakih, Mansour. 2003. *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Fink, Conrad C. 1995. *Media Ethics*. USA: McGraw-Hill.
- Griffin, Emory A. 2003. *A First Look at Communication Theory 5th ed*. New York: McGraw-Hill.
- Goffman, Erving. 1974. *Frame Analysis: An Essay on the Organization of Experience*. Cambridge: Harvard University Press.
- Hartiningsih, Maria. 1999. "Diskusi FIM III Putaran Ke-7: Terstruktur, Hegemoni Pembisuan Perempuan Indonesia", dalam KOMPAS edisi Kamis, 11 Maret 1999.
- Lan, May. 2002. *Pers, Negara, dan Perempuan*. Yogyakarta: Kalika.

- Lind, Rebecca Ann dan Colleen Salo. 2002. "The Framing of Feminists and Feminism in News and Public Affairs Programs in US Electronic Media", dalam Jon F. Nussbaum (ed.), *Journal of Communication* Vol. 52 No.1, International Communication Association.
- McQuail, Dennis. 1994. *Teori Komunikasi Massa: Suatu Pengantar*. Jakarta: Erlangga.
- Rivers, William L., Jay W. Jensen, dan Theodore Peterson. 2004. *Media Massa dan Masyarakat Modern*. Jakarta: Prenada Media.
- Siregar, Ashadi, Rondang Pasaribu, dan Ismay Prihastuti (ed.), 1999. *Media dan Gender: Perspektif Gender atas Industri Surat kabar Indonesia*. Yogyakarta: LP3Y.
- Schwalbe, Carol B. 2006 "Remembering Our Shared Past: Visually Framing the Iraq War on US News Website", dalam *Journal of Computer-Mediated Communication* Vol. 12. Tersip di <http://www.blackwell-synergy.com/doi/pdf/10.1111/j.1083-6101.2006.00325.x>, diakses 23 Mei 2007.
- Shalahuddin, Henri. 2007. "Poligami dan Gerakan Feminisme Global". Tersip di [http://www.annah.com/index.php?options=com\\_content&task=view&id=387&Itemid=96](http://www.annah.com/index.php?options=com_content&task=view&id=387&Itemid=96), diakses 8 Februari 2007.
- Sobur, Alex. 2002. *Analisis Teks Media*. Bandung: Penerbit Remaja Rosda Karya.
- Sudibyo, Agus. 2001. *Politik Media dan Pertarungan Wacana*. Yogyakarta: LKiS.
- Sushartami, Wiwik. 2003. "Perempuan dan Media Massa". Tersip di <http://www.duniaesai.com/gender/index.html>, diakses 8 Februari 2007.
- \_\_\_\_\_. 2003. "Media dan Perjuangan Identitas Perempuan Pasca Orde Baru". Tersip di <http://www.kompas.com/kompas-cetak/0307/21/swara/439248.htm>, diakses 11 Mei 2007.
- Utami, Pratiwi. 2007. "Framing Media Merekam Feminisme Indonesia: Analisis Framing terhadap Berita Bertema Feminisme di Harian KOMPAS Periode Tahun 1997-1999". *Skripsi*. Jurusan Ilmu Komunikasi Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Wolf, Naomi. 1997. *Gegar Gender: Kekuatan Perempuan Menjelang Abad 21*. Yogyakarta: Pustaka Semesta Press.
- Yusuf, Iwan Awaluddin. 2004. "Peningkatan Kepekaan Gender dalam Jurnalisme", dalam *Jurnal FISIPOL UGM* Vol. 7, No. 3, Maret 2004.